



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2348/MENKES/PER/XI/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. *International Health Regulations (IHR) 2005;*

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 ;

MEMUTUSKAN...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) KKP dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) KKP diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas, yaitu :
 - a. KKP Kelas I;
 - b. KKP Kelas II;
 - c. KKP Kelas III; dan
 - d. KKP Kelas IV.

(2) Klasifikasi...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

(2) Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

2. Ketentuan setelah Bagian Ketiga ditambahkan satu bagian baru yaitu Bagian Ketiga A dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambahkan beberapa pasal baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Pasal 33A

KKP Kelas IV terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
- c. Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah;
- d. Instalasi;
- e. Wilayah Kerja; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33B

Bagan Organisasi KKP Kelas IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A Peraturan ini.

Pasal 33C

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, informasi, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 33D

Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pasal...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 33E

Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Ketentuan pada Pasal 38 dan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas Kepala KKP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan para Petugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar KKP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Para Petugas wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

5. Ketentuan Bab VII Pasal 47 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

LOKASI

Pasal 47

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas II, 20 (dua puluh) KKP Kelas III, dan 1 (satu) KKP Kelas IV
- (2) Daftar KKP di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, KKP Induk, dan Wilayah Kerja KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

6. Ketentuan...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

6. Ketentuan diantara pasal 50 dan 51 ditambahkan satu pasal baru yaitu pasal 50A sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Eselon KKP Kelas IV terdiri atas:

- a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 877

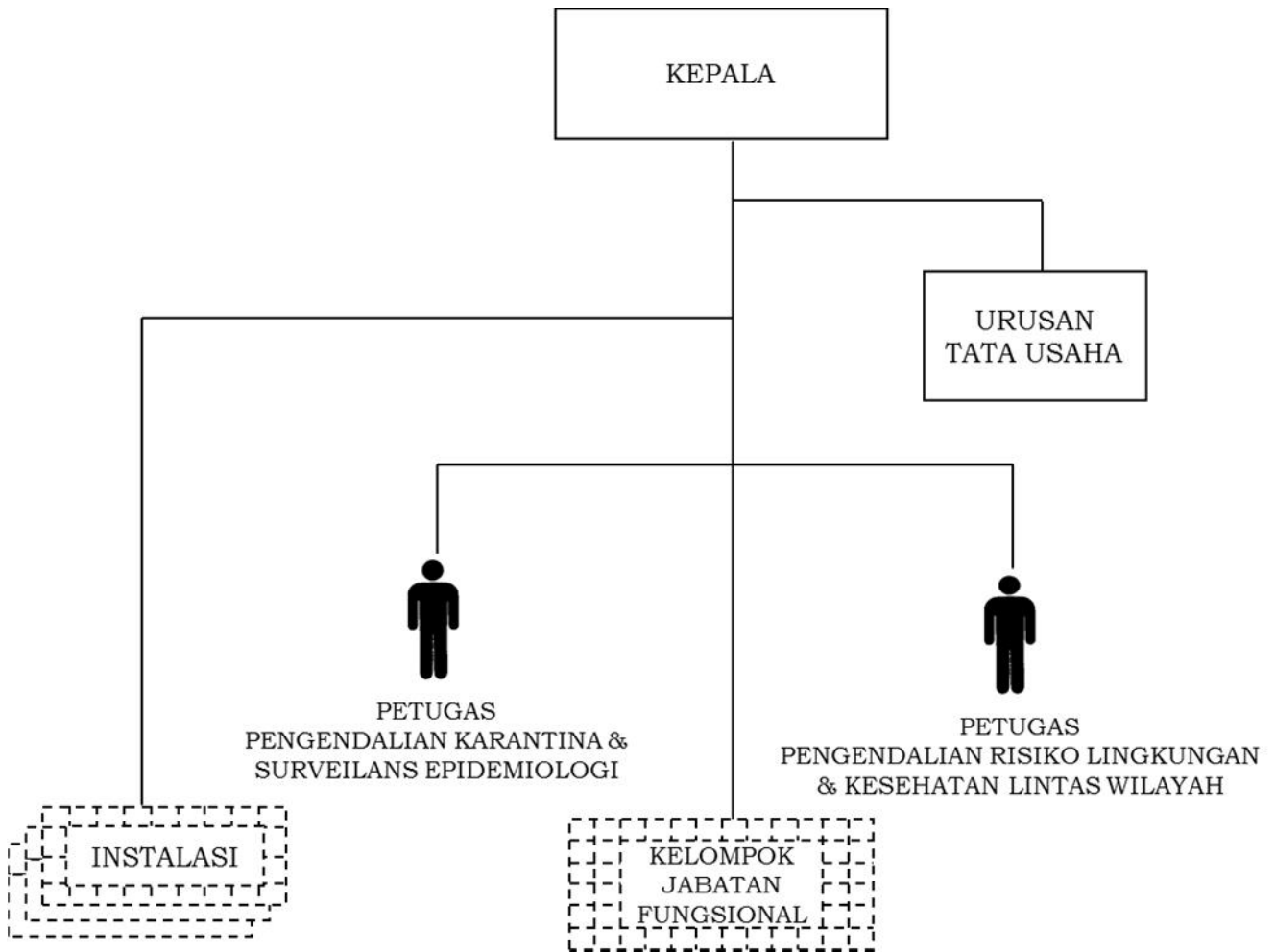


**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

LAMPIRAN IIIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 2348/MENKES/PER/XI/2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011

**BAGAN ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS IV**



MENTERI KESEHATAN,
Usmanawati
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR :2348/MENKES/PER/XI/2011
TANGGAL :22 NOVEMBER 2011

**DAFTAR KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
1	Tanjung Priok	I	DKI Jakarta	Tanjung Priok (Pelabuhan Laut Tanjung Priok)	1. Pelabuhan Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol 2. Pelabuhan Samudra Muara Baru 3. Pelabuhan Laut Marunda 4. Pelabuhan Laut Kali Baru 5. Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara
2	Denpasar	I	Bali	Denpasar (Bandara Ngurah Rai)	1. Pelabuhan Laut Celukan Bawang 2. Pelabuhan Laut Padang Bai 3. Pelabuhan Laut Gilimanuk 4. Pelabuhan Laut Benoa
3	Surabaya	I	Jawa Timur	Surabaya (Pelabuhan Laut Tanjung Perak)	1. Bandara Juanda 2. Pelabuhan Laut Gresik 3. Pelabuhan Laut Kalianget 4. Pelabuhan Laut Tuban 5. Pelabuhan Laut Bawean
4	Soekarno Hatta	I	Banten	Cengkareng (Bandara Soekarno Hatta)	Bandara Halim Perdana Kusuma
5	Medan	I	Sumatera Utara	Medan (Pelabuhan Laut Belawan)	1. Bandara Polonia 2. Pelabuhan Laut Pantai Cermin 3. Pelabuhan Laut Pangkalan Susu 4. Pelabuhan Laut Sibolga 5. Pelabuhan Laut Kuala Tanjung



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
					6. Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan 7. Pelabuhan Laut Teluk Nibung 8. Pelabuhan Laut Gunung Sitoli
6	Makassar	I	Sulawesi Selatan	Makassar (Pelabuhan Laut Makassar)	1. Bandara Hasanudin 2. Pelabuhan Laut Pare-Pare 3. Pelabuhan Laut Malili 4. Pelabuhan Laut Biringkasi 5. Pelabuhan Laut Awerange 6. Pelabuhan Laut Palopo 7. Pelabuhan Laut Belang-Belang Mamuju 8. Pelabuhan Laut Bajoe Bone 9. Bandara Tumpa Padang
7	Batam	I	Kepulauan Riau	Batam (Pelabuhan Laut Batu Ampar)	1. Bandara Internasional Hang Nadim 2. Pelabuhan Laut Internasional Sekupang 3. Pelabuhan Laut Domestik Sekupang 4. Pelabuhan Laut Pulau Sambu 5. Pelabuhan Laut Nongsa 6. Pelabuhan Laut Kabil 7. Pelabuhan Laut Telaga Punggur 8. Pelabuhan Laut F. Batam Center 9. Pelabuhan Laut Tanjung Unjang Sagulung 10. Pelabuhan Laut Teluk Senimba 11. Pelabuhan Laut Semblog 12. Pelabuhan Laut F. Harbour Bay



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
8	Tanjung Pinang	II	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang (Pelabuhan Laut Tanjung Pinang)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Kijang2. Pelabuhan Laut Tanjung Uban3. Pelabuhan Laut Samudera Kijang4. Pelabuhan Laut Tarempa5. Pelabuhan Laut Lagoi6. Pelabuhan Laut Lobam7. Pelabuhan Laut Tambelan8. Pelabuhan Laut Dabo Singkep9. Pelabuhan Laut Ranai, Natuna10. Bandara Matak
9	Banjarmasin	II	Kalimantan Selatan	Banjarmasin (Pelabuhan Laut Banjarmasin)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Syamsudin Noor2. Pelabuhan Laut Kotabaru3. Pelabuhan Laut Batulicin4. Pelabuhan Laut Satui5. Pelabuhan Tanipah
10	Kendari	II	Sulawesi Tenggara	Kendari (Pelabuhan Laut Kendari)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Wolter Monginsidi2. Pelabuhan Laut Pomalaa3. Pelabuhan Laut Bau-Bau4. Pelabuhan Laut Kolaka5. Pelabuhan Laut Wanci
11	Tarakan	II	Kalimantan Timur	Tarakan (Pelabuhan Laut Tarakan)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Tarakan2. Pelabuhan Laut Bunyu3. Pelabuhan Laut Sebatik4. Pelabuhan Laut Nunukan5. Pelabuhan Laut Berau



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
12	Mataram	II	Nusa Tenggara Barat	Mataram (Bandara Selaparang)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Lembar2. Pelabuhan Laut Pemenang & Ampenan3. Pelabuhan Laut Kayangan4. Pelabuhan Laut Poto Tano5. Pelabuhan Laut Bima6. Pelabuhan Laut Sape7. Pelabuhan Laut Badas8. Pelabuhan Laut Khusus Benete
13	Padang	II	Sumatera Barat	Padang (Pelabuhan Laut Teluk Bayur)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Minangkabau2. Pelabuhan Laut Muara Padang3. Pelabuhan Laut Sikakap4. Pelabuhan Laut Bungus
14	Semarang	II	Jawa Tengah	Semarang (Pelabuhan Laut Tanjung Mas)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Achmad Yani2. Bandara Adi Sumarmo3. Pelabuhan Laut Pekalongan4. Pelabuhan Laut Tegal5. Pelabuhan Laut Jepara6. Pelabuhan Laut Juwana7. Pelabuhan Laut Rembang8. Pelabuhan Laut Batang9. Pelabuhan Laut Karimunjawa
15	Palembang	II	Sumatera Selatan	Palembang (Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Palembang2. Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
16	Probolinggo	II	Jawa Timur	Probolinggo (Pelabuhan Laut Probolinggo)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Panarukan2. Pelabuhan Laut Tanjung Wangi3. Pelabuhan Laut Pasuruan4. Pelabuhan Laut Paiton5. Bandara Abd Rachman Saleh Malang
17	Ambon	II	Maluku	Ambon (Pelabuhan Laut Ambon)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Pattimura2. Pelabuhan Laut Tual3. Pelabuhan Laut Dobo4. Pelabuhan Laut Saumlaki5. Pelabuhan Laut Banda Neira6. Pelabuhan Laut Namlea7. Pelabuhan Laut Piru8. Pelabuhan Laut Tulehu9. Pelabuhan Laut Wonreli
18	Pekanbaru	II	Riau	Pekanbaru (Bandara Sultan Syarif Kasim II)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Pakanbaru2. Pelabuhan Laut Selat Panjang3. Pelabuhan Laut Buatan4. Pelabuhan Laut Siak Sri Indrapura5. Pelabuhan Laut Tanjung Buton6. Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru
19	Balikpapan	II	Kalimantan Timur	Balikpapan (Pelabuhan Laut Balikpapan)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Sepinggan2. Pelabuhan Laut Kampung Baru3. Pelabuhan Khusus Tanah Merah Grogot4. Pelabuhan Khusus PTP Tanah Merah Grogot5. Pelabuhan Khusus Senipah6. Pelabuhan Khusus Handil II



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
					7. Pelabuhan Khusus Long Ikis 8. Pelabuhan Khusus Kuaro 9. Pelabuhan Khusus Sungai Kerang 10. Pelabuhan Laut Semboja
20	Manado	II	Sulawesi Utara	Manado (Bandara Sam Ratulangi)	1. Pelabuhan Laut Manado 2. Pelabuhan Laut Tahuma 3. Pelabuhan Marore 4. Pelabuhan Laut Miangas 5. Pelabuhan Laut Siau 6. Pelabuhan Laut Likupang 7. Pelabuhan Laut Lirung 8. Pelabuhan Laut Petta 9. Pelabuhan Laut Melonguane
21	Bandung	II	Jawa Barat	Bandung (Bandara Husein Sastranegara)	1. Pelabuhan Laut Cirebon 2. Pelabuhan Laut Balongan 3. Pelabuhan Laut Indramayu 4. Pelabuhan Laut Pamanukan 5. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 6. Pelabuhan Ratu Sukabumi 7. Pelabuhan Laut Brebes
22	Banten	II	Banten	Cilegon (Pelabuhan Laut Merak)	1. Pelabuhan Laut Anyer 2. Pelabuhan Laut Bojonegara 3. Pelabuhan Laut Labuan 4. Pelabuhan Laut Karangantu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
23	Pontianak	II	Kalimantan Barat	Pontianak (Pelabuhan Laut Pontianak)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Supadio2. Pelabuhan Laut Sintete3. Pelabuhan Laut Ketapang4. Pelabuhan Laut Kandawangan5. Pos Lintas Batas Entikong6. Pos Lintas Batas Badau7. Pos Lintas Batas Jagoi Babang8. Pos Lintas Batas Aruk9. Pelabuhan Laut Telok Air
24	Samarinda	II	Kalimantan Timur	Samarinda (Pelabuhan Laut Samarinda)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Tanjung Laut2. Pelabuhan Laut Sangatta3. Pelabuhan Lhok Tuan4. Pelabuhan Laut Sangkulirang5. Bandara Temindung6. Pelabuhan Laut Tanjung Santan
25	Cilacap	II	Jawa Tengah	Cilacap (Pelabuhan Laut Tanjung Intan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap2. Bandara Tunggul Wulung3. Pelabuhan Laut Pemalang4. Pelabuhan Laut Pangandaran
26	Panjang	II	Bandar Lampung	Panjang (Pelabuhan Laut Panjang)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Radin Intan II2. Pelabuhan Laut Bakauheni3. Pelabuhan Laut Teluk Semangka4. Pelabuhan Laut Rawajitu
27	Jayapura	II	Papua	Jayapura (Pelabuhan Laut Jayapura)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Sentani2. Pelabuhan Laut Sarmi3. Pelabuhan Laut Hamadi4. Pos Lintas Batas Skouw5. Bandara Wamena



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
28	Tanjung Balai Karimun	II	Kepulauan Riau	Tanjung Balai Karimun (Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Pasir Panjang2. Pelabuhan Laut Tanjung Batu3. Pelabuhan Laut Moro4. Pelabuhan Laut Meral
29	Pangkal Pinang	III	Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang (Pelabuhan Laut Pangkal Balam)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Tanjung Pandan2. Pelabuhan Laut Manggar3. Pelabuhan Laut Muntok4. Pelabuhan Laut Belinyu5. Bandara Depati Amir6. Pelabuhan Sungai Selan
30	Bitung	III	Sulawesi Utara	Bitung (Pelabuhan Laut Bitung)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Labuan UKI2. Pelabuhan Amurang3. Pelabuhan Laut Kotabunan4. Pelabuhan Kema5. Pelabuhan Laut Belang6. Pelabuhan Laut Molibagu7. Pelabuhan Laut Bintauna
31	Tembilahan	III	Riau	Tembilahan (Pelabuhan Laut Tembilahan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Kuala Enok2. Pelabuhan Laut Pulau Kijang3. Pelabuhan Laut Rengat4. Pelabuhan Laut Kuala Gaung5. Pelabuhan Laut Sungai Guntung
32	Jambi	III	Jambi	Jambi (Bandara Sultan Thaha)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Jambi2. Pelabuhan Laut Muara Sabak3. Pelabuhan Laut Kuala Tungkal4. Pelabuhan Laut Talang Duku5. Pelabuhan Laut Nipah Panjang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
33	Dumai	III	Riau	Dumai (Pelabuhan Laut Dumai)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Bengkalis2. Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi3. Pelabuhan Laut Sungai Pakning4. Pelabuhan Laut Penipahan5. Pelabuhan Laut Senebui6. Pelabuhan Laut Tanjung Medang7. Kawasan Industri Pelintung8. Bandara Pinang Kampai
34	Palu	III	Sulawesi Tengah	Palu (Pelabuhan Laut Pantoloan)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Mutiara2. Pelabuhan Laut Donggala3. Pelabuhan Laut Toli-Toli4. Pelabuhan Laut Buol5. Pelabuhan Laut Moutong6. Pelabuhan Laut Palele7. Pelabuhan Laut Wani8. Pelabuhan Laut Luwuk
35	Kupang	III	Nusa Tenggara Timur	Kupang (Bandara El Tari)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Tenau2. Pelabuhan Laut Kalabahi3. Pelabuhan Laut Atapupu4. Pelabuhan Laut Labuan Bajo5. Pelabuhan Laut Maumare6. Pelabuhan Laut Waingapu7. Pelabuhan Laut Ende8. Pelabuhan Laut Reo9. Pelabuhan Laut Bolok10. Pos Lintas Batas Motaain11. Pos Lintas Batas Metamauk12. Pos Lintas Batas Napan13. Pelabuhan Laut Lembata14. Pelabuhan Laut Ba'a15. Bandara Tambulaka



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
36	Biak	III	Papua	Biak (Kota Biak)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Biak2. Bandara Frans Kaisepo3. Bandara Moses Kilangin4. Pelabuhan Laut Amamapare5. Pelabuhan Laut Serui6. Pelabuhan Laut Samabusa7. Pelabuhan Laut Pomako8. Pelabuhan Laut Waren
37	Sorong	III	Papua Barat	Sorong (Pelabuhan Laut Sorong)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Sorong2. Pelabuhan Laut Fak-Fak3. Pelabuhan Laut Kaimana4. Pelabuhan Laut Khusus Sale5. Pelabuhan Laut Khusus Arar6. Pelabuhan Laut Raja Ampat7. Pelabuhan Laut Teminabuan
38	Manokwari	III	Papua Barat	Manokwari (Pelabuhan Laut Manokwari)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Wondama2. Pelabuhan Laut Bintuni3. Pelabuhan Laut Babo4. Bandara Rendani
39	Sampit	III	Kalimantan Tengah	Sampit (Pelabuhan Laut Sampit)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Kuala Pembuang2. Pelabuhan Laut Samuda3. Bandara Pangkalan Bun4. Pelabuhan Laut Kumai5. Pelabuhan Laut Sukamara6. Bandara H. Hasan7. Pelabuhan Laut Pangkalan Bun



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
40	Banda Aceh	III	Aceh	Banda Aceh (Kota Banda Aceh)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Sultan Iskandar Muda2. Pelabuhan Laut Malahayati3. Pelabuhan Laut Ulee Lheu4. Pelabuhan Lhok Nga5. Pelabuhan Laut Meulaboh6. Pelabuhan Laut Singkil7. Pelabuhan Laut Labuhan Haji8. Pelabuhan Laut Tapak Tuan9. Pelabuhan Laut Sinabang
41	Merauke	III	Papua	Merauke (Pelabuhan Laut Merauke)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Agats2. Pelabuhan Laut Bade3. Pelabuhan Laut Wanam4. Pos Lintas Batas Sota5. Pos Lintas Batas Mindip Tanah
42	Lhokseumawe	III	Aceh	Lhokseumawe (Pelabuhan Laut Lhokseumawe)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Kuala Langsa2. Pelabuhan Laut Sigli3. Bandara Rembele4. Pelabuhan Laut Kuala5. Bandara Malikussaleh
43	Bengkulu	III	Bengkulu	Bengkulu (Pelabuhan Laut Bai)	<ol style="list-style-type: none">1. Bandara Fatmawati Soekarno2. Pelabuhan Laut Muko-Muko3. Pelabuhan Laut Bintuhan4. Pelabuhan Laut Malakoni Enggano
44	Poso	III	Sulawesi Tengah	Poso (Pelabuhan Laut Poso)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Laut Ampana2. Pelabuhan Laut Kolonedale3. Pelabuhan Laut Banggai Kepulauan4. Pelabuhan Laut Bungku



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN (PROVINSI)	KKP INDUK	WILAYAH KERJA
45	Palangkaraya	III	Kalimantan Tengah	Palangkaraya (Bandara Tjilik Riwut)	1. Pelabuhan Laut Pangantan 2. Pelabuhan Laut Sebangau 3. Pelabuhan Laut Kuala Kapuas 4. Pelabuhan Khusus Klanis 5. Pelabuhan Laut Pulang Pisau 6. Pelabuhan Laut Bahawur
46	Gorontalo	III	Gorontalo	Gorontalo (Pelabuhan Laut Gorontalo)	1. Pelabuhan Laut Anggrek 2. Pelabuhan Laut Paguat 3. Pelabuhan Laut Kwandang 4. Bandara Djalaluddin 5. Pelabuhan Laut Tilamuta
47	Ternate	III	Maluku Utara	Ternate (Pelabuhan Laut Ternate)	1. Pelabuhan Laut Mangole 2. Pelabuhan Laut Jailolo 3. Pelabuhan Laut Buli 4. Pelabuhan Laut Bacan 5. Pelabuhan Laut Tobelo 6. Bandara Sultan Boabullah 7. Pelabuhan Laut Morotai
48	Sabang	III	Aceh	Sabang (Kota Sabang)	1. Pelabuhan Laut Teluk Sabang 2. Bandara Maimun Saleh 3. Pelabuhan Laut Balohan
49	Yogyakarta	IV	DI Yogyakarta	Yogyakarta (Bandara Adi Sutjipto)	1. Pelabuhan Laut Baron 2. Pelabuhan Laut Kulonprogo



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH